

UMP DIY 2024 DIPASTIKAN NAIK

## Sultan: Kenaikannya Berapa Saya Belum Tahu

**YOGYA (KR)** - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2024 akan mengalami kenaikan. Kendati demikian untuk berapa persen kenaikannya Sultan belum bisa memastikan hal tersebut. Hal itu dikarenakan sampai saat ini koordinasi dan pembahasan berkaitan dengan hal itu masih dilakukan. Adapun untuk penentuan besaran UMP DIY tahun 2024 akan menggunakan acuan peraturan baru tentang pengupahan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023.

pasti naik, tapi berapa besarnya saya tidak tahu. Jadi kita lihat saja nanti," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Selasa (14/11).

Sultan mengatakan, penentuan UMP 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) terbaru. Untuk menentukan besaran UMP DIY saat ini sedang dilakukan pembahasan di tingkat provinsi maupun kabupaten. Terutama berkaitan dengan penentuan skema. Tentunya dalam pembahasan tersebut melibatkan sejumlah stakeholders terkait termasuk dewan pengupahan.

"Saya belum mempelajari secara detail kaitan soal PP yang baru tentang pengupahan. Memang PP terbaru sudah ada tapi saya kan rapatnya baru hari Kamis, sekarang saya belum tahu," ungkap Sultan.

Sementara itu seperti diberitakan sebelumnya Kepala Disnakertrans DIY Aira Nugrahadi menyatakan formula yang digunakan untuk menghitung kenaikan upah sudah ada rumusannya di dalam PP 51 Tahun 2023. Dimana dalam penentuan itu menggunakan beberapa parameter. Diantaranya pertumbuhan ekonomi serta inflasi dan ada indeks koefisien tertentu terkait perkembangan atau

perhitungan kontribusi pekerja terhadap produktivitas usaha. Adapun nilai indeks tertentu dalam PP tersebut berkisar 0,1 sam-

pai dengan 0,3.

"Kalau untuk penghitungannya akan dilakukan di sidang dewan pengupahan, Nanti keputu-

sannya juga bisa diambil di sidang dewan pengupahan. Dimana dalam sidang dewan pengupahan tersebut nantinya ada berbagai

unsur seperti serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, pakar, akademisi dan Badan Pusat Statistik (BPS)," terangnya. **(Ria)-f**

## Pengobatan Tradisional Penunjang Transformasi Kesehatan

**YOGYA (KR)** - DIY unggul dengan kekayaan pengobatan tradisional berupa herbal dan jamu warisan dari leluhur. Saat ini, pengobatan tradisional menjadi alternatif penunjang transformasi kesehatan di Indonesia.

"Penguatan pelayanan kesehatan tradisional adalah langkah yang sejalan dengan arahan Presiden RI untuk menekankan aspek aktif dan preventif dalam penanganan kesehatan," kata Wakil Gubernur (Wagub) DIY Sri Paku Alam X pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke - 59 tahun 2023 di Hotel Marriot Yogyakarta, Selasa (14/11).

Peringatan HKN mengangkat tema 'Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju, insan kesehatan berkomitmen mendorong inovasi dalam memperbaiki dan memajukan kesehatan'. Salah satunya memajukan kesehatan tradisional sebagai bagian dari gerakan bersama mewujudkan Indonesia sehat.

Paku Alam X mengatakan, kesehatan tradisional adalah bagian dari warisan bu-

daya yang patut dilestarikan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kekayaan warisan leluhur itu selain memberikan manfaat tak ternilai bagi kesehatan masyarakat, juga menjadi alternatif bagi pertumbuhan ekonomi, serta penekanan biaya pendukung penyelenggaraan kesehatan.

Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajoen Setyaningastutie menyatakan, HKN yang dipelembungkan setiap tanggal 12 November sangat penting untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya kesehatan. Selain itu menjadi pengingat insan kesehatan agar senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dalam peringatan kali ini DIY lebih spesifik mengangkat tema Integrasi Kesehatan Tradisional Mendukung Transformasi Kesehatan. Karena transformasi kesehatan adalah strategi dan upaya untuk mengakselerasi pencapaian pembangunan kesehatan dan menyelesaikan permasalahan kesehatan. **(Ria)-f**



JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

TERBUKTI MAMPU BERTAHAN SAAT PANDEMI

## Keberpihakan Terhadap UMKM Harus Diprioritaskan

**YOGYA (KR)** - Keberpihakan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus menjadi skala prioritas bagi pemerintah. Dibanding perusahaan besar, UMKM telah terbukti mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Yogya Dra Sri Retnowati, mengungkapkan keberpihakan tersebut sangat dibutuhkan agar pelaku UMKM bisa semakin berkembang dan mampu bersaing secara setara. "Setelah pandemi berakhir saatnya UMKM terus didorong. Apalagi Kota Yogya ini kan gudangnya UMKM," katanya.

Bukan berarti keberpihakan pemerintah terhadap UMKM selama ini dinilai rendah. Menurut Retnowati, dukungan pemerintah sudah sangat baik akan tetapi perlu ada penekanan atau keberlanjutan. Misalnya UMKM yang sudah dijumpai akses permodalan tidak lantas dilepaskan begitu saja namun tetap ada pendampingan baik dalam proses produksi, pemasaran hingga pembukuan transaksi atau manajerial.

Dukungan secara komprehensif yang meliputi se-

Dra Sri Retnowati  
Ketua Fraksi Partai Golkar



KR-Istimewa

buah unsur tersebut dapat konsisten digulirkan ketika sudah menjadi skala prioritas pembangunan. Sehingga mulai dari akses modal, bantuan peralatan, kurasi produk, pemasaran hingga pembukuan mendapatkan perhatian dan bimbingan yang optimal dari pemerintah. Dengan begitu pelaku UMKM bisa lebih fokus dalam mengembangkan usaha bahkan mampu mandiri.

"UMKM merupakan salah satu kekuatan ekonomi di wilayah. Sudah terbukti saat pandemi lalu ketika banyak perusahaan terdampak namun UMKM mampu bertahan," tandasnya.

Retnowati yang duduk di Komisi B maupun ketua fraksi ini juga berharap pelaku UMKM mendapatkan kemudahan dalam mengakses aspek legalitas. Hal ini agar usaha yang dijalankan memiliki perlindungan hukum serta terbuka peluang yang sama atas program pemerintah. Legalitas baik berupa nomor induk berusaha (NIB), PIRT maupun sertifikasi halal sangat dibutuhkan pada era saat ini. Terutama untuk memasarkan produk agar bisa menjangkau konsumen dalam skala luas. **(Dhi)-f**



KOMISI B DPRD KOTA YOGYAKARTA

## Rebranding Program Unggulan, Pikat Daya Tarik Wisatawan



Rapat pembahasan Komisi B bersama tim eksekutif.



KR-Ardhi Wahdan



KR-Ardhi Wahdan

Perwakilan eksekutif dari Dinas Pertanian dan Pangan rapat di Komisi B.

**YOGYA (KR)** - Sebagai daerah tujuan wisata, Kota Yogyakarta dituntut mampu terus berinovasi dalam memunculkan destinasi. Tidak sebatas membuat destinasi baru melainkan memoles berbagai program yang sebetulnya sudah berjalan. Terutama dengan melakukan rebranding program unggulan guna memikat daya tarik wisatawan secara lebih luas.

Komisi B DPRD Kota Yogyakarta memberikan perhatian terkait hal tersebut. Salah satu alat kelengkapan dewan yang membidangi urusan pariwisata ini mengusulkan supaya Pemkot Yogya semakin jeli di tengah persaingan industri pariwisata dengan daerah lain. "Kalau kita mampu melakukan eksplorasi secara mendalam, sebetulnya banyak program yang sebetulnya itu bisa mendatangkan wisatawan. Tidak harus melalui membuat event maupun kegiatan baru, tetapi yang sudah ada ini tinggal dipoles saja sebenarnya," urai Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Susanto Dwi Antoro di sela rapat kerja dengan tim eksekutif.

Selain itu, membangkitkan sektor destinasi wisata juga bukan semata menjadi kewenangan Dinas Pariwisata maupun Dinas Kebudayaan saja. Hampir semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkot Yogya berpeluang menciptakan destinasi wisata.

Dicontohkannya Dinas Pertanian dan Pangan yang memiliki beragam program kegiatan unggulan. Salah satu yang mendapat perhatian dari jajaran Komisi B ialah keberadaan Kebun Plasma Nutfah Pisang. Selama ini sebenarnya sudah mampu menarik minat kunjungan masyarakat, hanya optimalisasinya masih kurang karena OPD terkait fokus pada aspek penelitian atau laboratorium. Padahal jika mampu dikombinasikan dengan kunjungan wisatawan maka bisa memberikan nilai tambah. "Di sana itu kan koleksi pisangnya mencapai ratusan jenis. Bahkan terlengkap

di tingkat ASEAN. Usulan perbaikan dengan konblokisasi serta pembuatan gasebo juga telah kami setuju. Mungkin bisa dilakukan sedikit pembenahan, sudah bisa menjadi destinasi," tandasnya.

Apalagi selama ini setiap akhir pekan terutama Sabtu dan Minggu, kebun tersebut juga terbuka bagi masyarakat. Akan tetapi kunjungan dari masyarakat umum atau wisatawan masih cukup terbatas dan banyak untuk kepentingan pembelian bibit.

Oleh karena itu Komisi B mengusulkan supaya ada rebranding Kebun Plasma Nutfah Pisang. Rebranding yang dimaksud ialah dengan mengganti nama agar semakin familiar di telinga wisatawan. Pasalnya jika menggunakan nama kebun plasma nutfah identik dengan kegiatan laboratorium sehingga daya pikat untuk dikunjungi oleh wisatawan belum kuat. "Apa pun namanya nanti bisa dibahas lebih mendalam. Tetapi perlu rebranding dengan nama baru yang tidak terlalu formal tanpa harus merubah pengelolaan yang sudah dilakukan selama ini," imbuhnya.

Selain rebranding, juga bisa diikuti dengan pelibatan pelaku usaha di sekitar lokasi. Khususnya usaha yang

berkaitan dengan pisang seperti aneka pangan olahan pisang, minuman aroma pisang, keripik debog dan lain sebagainya. Hal ini agar dalam satu tempat di kebun itu mampu memberikan kesan yang identik dengan pisang. Di sana pengunjung bisa melihat proses pembenihan pisang dengan sistem kultur jaringan, menikmati suasana kebun pisang yang asri, mengetahui jenis pisang langka hingga memanen sendiri pisang untuk konsumsi maupun pembelian bibit berikut produk olahan makanan pisang.

"Potensi dari kebun pisang ini bisa dikembangkan lebih luas. Yang paling penting ada kesiapan dulu untuk menyambut tingkat kunjungan. Nanti kita bahas promosinya melibatkan OPD lain, jadi Dinas Pertanian dan Pangan pun bisa menyumbangkan destinasi wisata alternatif. Ini baru dari kebun pisang saja, masih banyak program lain di dinas ini yang bisa direbranding agar bisa memikat wisatawan," paparnya.

Program lain yang bisa direbranding tersebut ialah balai benih ikan. Pasalnya, ada beberapa jenis ikan langka yang tengah dilakukan pembibitan di balai tersebut. Belum lagi keberadaan subraiser ikan hias yang ju-

ga berpotensi mendatangkan wisatawan. Utamanya wisatawan minat khusus yang memiliki ketertarikan terhadap ikan.

Apalagi keberadaan kebun pisang, balai benih ikan serta subraiser ikan hias tersebut seluruhnya berada di Yogya sisi selatan. Rebranding ketiga program unggulan milik Dinas Pertanian dan Pangan bahkan bisa disinergikan guna memperkuat Yogya sisi selatan sebagai salah satu pintu masuk bagi wisatawan. Pembangunan di Yogya sisi selatan memang perlu digencarkan agar pemerataan ekonomi semakin menyebar dan tidak terpusat di satu titik. Dengan begitu, manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Yogya juga semakin merata. "Ini kita baru bicara satu OPD yang kebetulan menjadi mitra kerja Komisi B. OPD lain pasti juga memiliki program unggulan yang bisa dioptimalkan maupun direbranding untuk menarik minat wisatawan," katanya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Oleg Yohan, menambahkan rebranding juga perlu dilakukan untuk program kampung flori. Pasalnya, jika masih menggunakan penamaan kampung flori maka yang terserbit di benak wisatawan ialah lokasi yang ada di Sleman. Padahal banyak perkampungan di Kota Yogya yang mengembangkan berbagai tanaman di halaman rumah maupun gang atau jalan kampung. Kampung flori itu tidak sebatas untuk penghijauan melainkan juga kebutuhan akan sayuran serta estetika dan kenyamanan kampung. "Makanya rebranding ini perlu supaya masyarakat itu terdorong untuk melakukan eksplorasi tentang Kota Yogya. Toh itu nanti yang merasakan manfaatnya juga kita semua. Jadi ketika menyebut Kota Yogya, yang terserbit oleh wisatawan tidak hanya pada satu tempat tertentu seperti Malioboro saja tetapi ternyata banyak tempat lain yang mendorong untuk dikunjungi," urainya. **(Dhi)-f**



Kebun Plasma Nutfah Pisang dengan beragam aneka jenis pisang.



KR-Ardhi Wahdan